

- ✦ **PENINGKATAN STATUS SOSIAL DAN KETIDAKADILAN DALAM KEHIDUPAN MASYARAKAT PADA PENDIDIKAN FORMAL**

Oleh Laros Tuhuteru

- ✦ **PENDIDIKAN TOLERANSI MALALUI PENELUSURAN JEJAK KEDATANGAN ETNIS TIONGHOA DI INDONESIA**

Oleh Efilina Kissiya

- ✦ **SARANA DAN PRASARANA PENJAS DI SEKOLAH ANTARA HARAPAN DAN KENYATAAN: Analisis Kebijakan Pendidikan**

Oleh Jonas Solissa

- ✦ **MENINGKATKAN HASIL BELAJAR SEJARAH MELALUI PENERAPAN STRATEGI PEMBELAJARAN KOMPETITIF PADA SISWA SMP NEGERI 1 LEIHITU KABUPATEN MALUKU TENGAH**

Oleh Wa Ima

- ✦ **HUBUNGAN MOTIVASI BELAJAR TERHADAP HASIL BELAJAR PENDIDIKAN KEWARGANEGARAAN PADA SISWA KELAS VII SMP ANGKASA LANUT PATTIMURA AMBON**

Oleh Agustinus Soumokil

- ✦ **TES KOMPETENSI BERBAHASA YANG INTEGRATIF**

Oleh Jolanda Dessye Parinussa

- ✦ **PEMBELAJARAN GEOLOGI: KAJIAN PELAPUKAN GEOLOGI**

Oleh Hasan Boinauw

- ✦ **PEMBELAJARAN SEJARAH DALAM KONTEKS PENDIDIKAN IPS**

Oleh Hamid Dokolamo



literasi



29/06/2010

PENINGKATAN STATUS SOSIAL DAN KETIDAKADILAN DALAM KEHIDUPAN MASYARAKAT PADA PENDIDIKAN FORMAL

Oleh Laros Tuhuteru

Dosen Program Studi PPKn

Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Pattimura

Abstrak: Penelitian ini dilakukan untuk mengungkap pengaruh status sosial ekonomi orang tua dan persepsi siswa atas lingkungan terhadap perilaku konsumsi yang diintermediasi prestasi belajar ekonomi siswa. Penelitian dilakukan dengan pendekatan kualitatif. Subyek penelitian adalah siswa. Hasil penelitian mengungkapkan bahwa, (1) secara langsung: (a) status sosial ekonomi orang tua berpengaruh positif dan signifikan terhadap perilaku konsumsi siswa; (b) persepsi siswa atas lingkungan berpengaruh positif dan signifikan terhadap perilaku konsumsi siswa; (c) status sosial ekonomi orang tua berpengaruh positif dan signifikan terhadap prestasi belajar ekonomi siswa; (d) persepsi siswa atas lingkungan berpengaruh positif dan signifikan terhadap prestasi belajar ekonomi; (e) prestasi belajar berpengaruh positif dan signifikan terhadap perilaku konsumsi siswa.

Kata-Kata Kunci: status sosial ekonomi, persepsi atas lingkungan, prestasi belajar IPS dan perilaku ketidakadilan.

PENDAHULUAN

Sikap peduli sosial dalam perbedaan kelas dan status sosial melalui sekolah, kampus, dan masyarakat umum diperlukan dalam rangka membangun sikap toleran siswa. Ada beberapa poin bahasan yang diharapkan dapat mengantarkan pembaca untuk memahami perbedaan stratifikasi sosial termasuk perbedaan kelas dan status sosial adalah bagian dari multikulturalisme. Bahasan tersebut yaitu, *pertama*, permasalahan yang terkait dengan ketidakadilan sosial, ekonomi dan politik. Persoalan tersebut membuat orang untuk berpikir kritis agar menuju upaya perbaikan melalui institusi-institusi yang ada di masyarakat maupun di lembaga-lembaga pendidikan. Bagian ini juga dilengkapi dengan beberapa kajian dasar tentang makna stratifikasi sosial dan unsur-unsur kelas, status, dan power. *Kedua*, masalah-masalah seputar kesejahteraan sosial yang meliputi, pengangguran warganegara dan kemiskinan, aparat negara, serta korupsi dan penegakan hukum. *Ketiga*, masalah peningkatan kepedulian sosial di sekolah, dan ketidakadilan di lingkungan sekolah. Dengan demikian, sekolah dan guru berperan membangun sikap kritis siswa terhadap fenomena ketidakadilan sosial, ekonomi dan politik.

Krisis multidimensi yang terjadi di Indonesia harus diakui telah menyebabkan berbagai persoalan sosial yang semakin meluas. Kemiskinan, pengangguran, dan kriminalitas terus meningkat persentasenya. Kebijakan ekonomi maupun politik pemerintah selama ini cenderung lebih mengutamakan kepentingan elit politik dan para pengusaha kelas atas adalah salah satu faktor utama yang menjadi penyebab kian parahnya krisis multidimensi tersebut.

Akibat dari keadaan ini golongan yang paling menderita adalah masyarakat yang berbeda pada lapisan sosial paling bawah. Kecilmnya perhatian dan tindakan serius lembaga pemerintahan, baik legeislatif maupun eksekutif terhadap masyarakat kelas bawah ini, telah menyebabkan jumlah masyarakat miskin dengan pengangurug semakin meningkat dari tahun ke tahun. Realitas seperti ini kian menyebabkan jurang pemisah antara masyarakat miskin dengan orang kaya semakin melebar.

Menghadapi persoalan yang sedemikian *complicat* ini, perlu dicari beberapa cara dan strategi untuk mengurangi, atau paling tidak meminimalkan, problem-problem tersebut. Dalam hal ini, eksekutif, legislative, dan yudikatif harus mampu membuat dan menerapkan kebijakan di berbagai bidang. Seperti bidang ekopnomi, hukum, pendidikan dan politik lebih mengutamakan kepentingan masyarakat kelas bawah yang *notabene* merupakan golongan mayoritas di negeri ini. Tindakan-tindakan kongkrit terhadap bermacam permasalahan yang rumit dari kelompok mayoritas ini, adalah tanggung jawab utama pemerintah yang tidak dapat ditawar-tawar lagi.

Langkah-langkah kongkrit yang sangat krusial dan harus segera dilakukan oleh pemerintah, misalnya di bidang ekonomi, harus benar-benar mampu merealisasikan “kebijakan ekonomi kerakyatan” yang selama ini dinilai sebagai *lips service* dari pemerintahan yang satu ke pemerintahan yang lain. Di bidang hukum, pemerintah harus berani menindak tegas para pelanggar hukum; terutama mereka-mereka yang termasuk koruptor tanpa pandang bulu, sekalipun orang terlibat pelanggaran hukum itu adalah orang-orang kuat secara ekonomis maupun politis.

Bidang politik, pemerintah sebagai bagian dari para elit politik harus kembali ingat pada janji—janjinya ketika kampanye jangan sampai elit politik (pemerintah) mengambil kebijakan yang justru menyengsarakan masyarakat hanya untuk mendapatkan keuntungan pribadi. Di bidang pendidikan, secara khusus, pemerintah harus benar-benar mampu untuk mencerdaskan seluruh masyarakat Indonesia dengan cara menyediakan pendidikan yang murah dan bermutu; pendidikan yang baik jangan hanya dinikmati oleh kalangan berduit yang merupakan bagian kecil dari masyarakat bangsa ini. Dan jangan sampai pendidiakan hanya bertujuan untuk membangun kemampuan kognitif (pengetahuan) dan psikomotorik (keterampilan) saja, akan tetapi mampu untuk membangun kemampuan afektif (sikap) siswa.

Pemerintah harus melaksanakan pendidikan multikultur yang penekanannya pada pembangunan sikap (afektif) yang termasuk di dalamnya adalah membangun kesadaran, pemahaman yang kritis siswa atau warga negara terhadap berbagai fenomena sosial

yang bersentuhan langsung dengan kepentingan masyarakat umum. Seperti ketimpangan sosial (stratifikasi sosial), pengangguran, kemiskinan dan korupsi. Langkah ini diharapkan dapat meningkatkan kesadaran peserta didik yang pada akhirnya dapat membangun kesadaran warganegara atau masyarakat, akan pentingnya menjunjung kepentingan umum, menjadi individu yang bertanggung jawab secara pribadi maupun sosial dan menjunjung moral dan etika dalam bermasyarakat.

Beberapa pembahasan dan teori dasar yang berkaitan dengan stratifikasi sosial akan dikaji dalam poin bahasan ini. Ulasan berikut tidak ditulis sebagaimana halnya dalam ilmu sosiologi atau ilmu-ilmu sosial lainnya. Akan tetapi pembahasan tentang makna stratifikasi sosial dan unsur-unsurnya seperti kelas, status dan power dapat memberikan gambaran dasar bagi pembaca untuk memahami dasar-dasar membangun sikap yang kritis dalam memandang adanya ketidakadilan sosial yang menjadi penyebab semakin dalam jurang pemisah antara yang miskin dan yang kaya.

KAJIAN TEORI

Sebuah negara yang sedang dilanda berbagai krisis yang berkepanjangan. Kesenjangan sosial yang sangat dalam antara kelompok masyarakat yang miskin dan kaya adalah suatu kenyataan yang sulit dihindari. Keadaan ini kemudian menyebabkan berbagai kelompok sosial dalam masyarakat itu sendiri. Perbedaan kelompok sosial merupakan salah satu bentuk dan bagian dari stratifikasi sosial.

Stratifikasi sosial itu, sebenarnya merupakan akibat ketidaksamaan

posisi dan tempat secara sosial di dalam masyarakat yang berbentuk pengategorian yang berbeda-beda, sehingga kesempatan untuk mendapatkan akses tertentu seperti stratifikasi sosial, ekonomi dan politik menjadi berbeda. Stratifikasi sosial adalah sebuah fenomena sosial. Sebuah label stratifikasi sosial bukan merupakan karakter yang dibawa manusia sejak lahir atau disebabkan oleh kekuatan supranatural yang datang dari luar kemampuan manusia. Stratifikasi sosial lebih merupakan akibat dari perubahan manusia yang dilakukan sekarang atau pada masa lalu. Dapat juga dikatakan bahwa generasi-generasi awal kita bisa menyebabkan keberhasilan atau kehancuran generasi yang akan datang (Ritzer, 1991).

Mengacu pada penjelasan di atas, timbulnya kesenjangan sosial yang sangat dalam antara kelompok masyarakat yang kaya dan yang miskin. Kemungkinan besar, merupakan akibat dari perbuatan para generasi pendahulu kita (pemerintah dahulu), atau bisa juga merupakan akibat dari perbuatan generasi sekarang (pemerintah sekarang). Untuk mencari bukti tentang kuatnya pendapat ini tidaklah sulit. Banyak kasus korupsi, kolusi dan nepotisme yang terjadi sejak era Orde Baru hingga era Reformasi sekarang ini merupakan bukti-bukti yang tidak bisa kita ingkari.

Weber menjelaskan bahwa di dalam stratifikasi sosial itu terdapat tiga unsur pokok, yaitu; kelas (*class*), status (*status*) dan pengaruh (*power*). Dalam penjelasannya, ketiga unsur pokok itu adalah sebagaimana berikut.

Kelas (*class*)

Kelas adalah rangking sosial dalam masyarakat yang diukur berdasarkan faktor-faktor dan nilai-nilai ekonomi. Secara khusus, dalam hal ini Marx membagi kelas menjadi empat kategori antara lain; pertama kelompok *capitalist* merupakan kelompok atau seseorang yang menguasai dan memunyai alat-alat produksi dan produksi itu sendiri. Kedua, kelas *bourgeois* adalah kelompok yang sejajar dengan kelas kapital. Dikatakan sejajar, karena kelompok ini masih memunyai ketergantungan pada kaum kapitalis lantaran tidak menguasai dan tidak memunyai alat-alat produksi maupun produksi sebagai hasil dari produksi. Orang-orang yang masuk dalam kelompok ini adalah para manajerbisnis kelas tinggi. *Ketiga*, kelas *proletariat* atau kelompok pekerja kasar merupakan golongan orang-orang yang menjual tenaga kasar mereka kepada kaum kapital dengan upah yang amat rendah. *Keempat*, Marx juga memasukkan golongan *lumpen proletariat* yang merupakan kelompok dari orang-orang yang lemah karena sistem yang ada. Yang masuk dalam golongan ini adalah para pengangguran permanen, seperti orang sakit mental, dan orang jompo.

Status

Status adalah rangking sosial yang didasarkan pada prestise (*prestige*) seperti gengsi, maupun martabat dan wibawa dalam kehidupan bermasyarakat. Status ini pada umumnya didasarkan pada tiga kategori seperti pekerjaan, idiologi dan keturunan.

Power

Power merupakan rangking sosial yang diukur dari sejauhmana

seseorang mampu memengaruhi orang lain untuk melakukan sesuatu seperti yang dia inginkan. Dalam hal ini, tidak semua orang bersatus tinggi memunyai kekuatan memengaruhi orang lain untuk melakuakn sesuatu. Namun demikian, orang yang memunyai status dan posisi kelas sosial yang tinggi memunyai kesempatan yang lebih besar untuk memengaruhi orang lain.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini dimaksudkan untuk memahami perilaku manusia dari kerangka acuan si pelaku itu sendiri, yakni bagaimana si pelaku memandang dan menafsirkan kegiatan dari segi mereka yang disebut dengan prespektik emik. Dalam hal ini, peneliti berusaha memahami dan menggambarkan apa yang dipahami dan digambarkan oleh subyek penelitian. Untuk maksud tersebut, peneliti menggunakan pendekatan kualitatif.

Penelitian dengan menggunakan pendekatan kualitatif ini berupaya memusatkan perhatian pada realitas sebagai produk pikir manusia dengan segala bentuk subyektivitas, emosi dan nilai-nilai yang dianut.

Sesuai dengan masalah yang diteliti, pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan penelitian kualitatif, tidak menggunakan upaya kuantitatif untuk perhitungan-perhitungan statistik, melainkan lebih menekankan pada kajian interpretatif. Hal ini sesuai dengan pendekatan Vernon van Dyke (Saprya, 2007:130) bahwa pada prinsipnya pendekatan kualitatif yang digunakan dalam penelitian berimplikasi pada penggunaan ukuran-ukuran kualitatif secara konsisten, artinya dalam pengolahan data, sejak mereduksi, menyajikan dan memperivikasi dan

menyimpulkan data tidak menggunakan upaya kuantifikasi perhitungan-perhitungan secara statistik, seperti lazimnya dalam penelitian kuantitatif akan tetapi lebih menekankan pada kajian interpretatif.

PEMBAHASAN

Beberapa penyebab kelambanan “pembangunan” kesejahteraan sosial di Indonesia, yaitu pengangguran dan kemiskinan, korupsi dan aparat negara yang korupsi dan penegakan hukum yang lemah. Kajian tersebut perlu dipahami oleh pembaca agar dapat membangun sikap yang kritis, peduli, dan bertanggungjawab dalam melihat fenomena ketidakadilan sosial, ekonomi dan politik.

Selain diskriminasi atau ketidakadilan di sekolah, peran sekolah dan guru juga menentukan terbentuk bangunan rasa tanggung jawab, sikap kritis dan kepedulian sosial siswa di sekolah.

Gambaran masalah 1

Sehari pascabanjir bandan di Wasior berupa gelombang tsunami kecil seorang guru PKn di sebuah SMA masuk kelas tanpa menyingung musiba yang telah dialami oleh saudara-saudara kita di Wasior. Begitu masuk kelas, si guru tersebut langsung memerintahkan murid-muridnya untuk membuka pekerjaan rumah dan membahasnya satu persatu.

Sikap guru seperti ini adalah sikap yang kurang tepat. Guru tersebut membelajarkan mata pelajaran PKn yang termasuk dalam kategori ilmu noneksata atau disebut ilmu sosial kemasyarakatan maka seharusnya

guru tidak meninggalkan kewajiban untuk menanamkan nilai-nilai kepedulian dan tanggung jawab sosial di kelas. Guru dalam kisah ini, harus meluangkan waktu untuk turut berduka atas musibah yang dialami oleh masyarakat di Wasior Papua bahkan kalau perlu melakukan doa bersama atau mengadakan penggalangan dana untuk meringankan beban mereka yang terkena musibah. Langkah ini diharapkan dapat meningkatkan kepedulian dan rasa empati atas musibah yang diderita orang lain.

Gambaran masalah 2

Sebelum ujian mid semester dimulai, ibu dosen memberi peringatan agar para peserta ujian tidak melakukan kecurangan seperti membawa kertas contek, membuka buku atau menjiplak hasil pekerjaan teman. “tidak ada toleransi sedikitpun bagi siapa saja yang melakukan kecurangan, mereka dianggap tidak mengikuti ujian dan tidak lulus.

Barang siapa dengan mengerjakan tes dengan penuh kejujuran akan mendapat nilai bagus.” Namun disayangkan, ketika ujian berlangsung, ibu dosen menangkap empat orang mahasiswa yang melakukan kecurangan. Sesuai dengan aturan yang diberlakukan, empat mahasiswa tersebut dikeluarkan dari ruang ujian dan ketika hasil ujian diumumkan mereka berempat dinyatakan tidak lulus.

Kisa yang kurang lebih sama dengan gambaran masalah ini pernah dialami oleh hampir semua dosen atau guru. Hanya sedikit yang berani mengambil tindakan tegas sebagaimana sikap dosen dalam gambaran di atas. Tidak ada aturan yang jelas dan resmi dari pihak sekolah terhadap para pelaku kecurangan dalam ujian menyebabkan para guru atau dosen ragu untuk mengambil tindakan tegas terhadap murid atau mahasiswa yang melakukan kecurangan dalam ujian. Keadaan tersebut kemudian menyebabkan sebagian besar dari kita lebih menggunakan perasaan belaskasih untuk memberikan toleransi terhadap apa yang telah mereka lakukan, meskipun tindakan tersebut sangat tidak mendidik.

Sikap tegas seperti yang dilakukan oleh dosen dalam gambaran masalah tersebut dapat kita lakukan ketika mengalami masalah yang sama. Karena sikap ini dapat membentuk karakter siswa atau warganegara yang jujur. Menghargai hasil karya dan usaha orang lain maupun diri sendiri dan bertanggung jawab terhadap apa yang telah dilakukan.

Guru dan sekolah mempunyai peran pokok terhadap pengembangan sikap siswa yang peduli dan kritis terhadap segala bentuk ketidakadilan sosial, ekonomi politik yang ada di sekitar. Menumbuhkan kesadaran kritis siswa sejak dini terhadap segala fenomena ketidakadilan yang ada, diharapkan dapat mendorong siswa untuk selalu bersikap kritis terhadap keadaan atau lingkungan yang tidak adil.

Guru juga mempunyai peran penting dalam menumbuhkan sikap kepedulian sosial siswa. Guru diakui

memunyai peran utama dalam pengembangan karakter siswa yang kritis terhadap fenomena ketidakadilan sosial, politik dan ekonomi di dalam atau di luar lingkungan siswa. Dalam pendidikan multikultural ada beberapa langkah penting yang diterapkan oleh guru dalam menumbuhkan sikap kepedulian sosial siswa. *Pertama*, dalam pendidikan multikultural, seorang guru sebaiknya mempunyai wawasan yang cukup tentang berbagai fenomena sosial yang ada di lingkungan murid-murid. Terutama yang berkaitan dengan ketidakadilan sosial, politik dan ekonomi seperti masalah kemiskinan, pengangguran, korupsi, dan lain-lain. Harus disadari bahwa tidak semua guru mempunyai wawasan dan pemahaman kritis tentang berbagai ketidakadilan yang terjadi. Untuk itu, penting bagi pihak sekolah untuk memberikan *training* dan pelatihan khusus untuk membangun pemahaman kritis guru terhadap berbagai fenomena ketidakadilan yang ada.

Kedua, guru harus mempunyai sensitifitas terhadap adanya diskriminasi dan ketidakadilan sosial, ekonomi dan politik. Ketika ada penggusuran terhadap perkampungan kumuh yang terletak tidak jauh dari sekolah, seorang guru harus mampu menjelaskan keadaan tersebut secara obyektif dan kritis. Kesensifan seorang guru dapat menjelaskan mengapa sampai terjadi penggusuran, ada dampak dari penggusuran itu, kenapa orang-orang yang tinggal di daerah yang digusur kebanyakan orang miskin, apa yang harus yang dilakukan pemerintah terhadap para korban penggusuran tersebut. Tentu, akan bermanfaat dalam membentuk wacana dan pemahaman siswa

terhadap berbagai fenomena sosial yang ada di sekitar siswa.

Ketiga, seorang guru dapat menerapkan secara langsung sikap peduli dan anti diskriminasi sosial, politik, dan ekonomi di kelas atau sekolah maupun di luar sekolah. Guru dapat menerapkan sikap tersebut dengan cara bersikap adil kepada seluruh siswa tanpa harus mengistimewakan salah satu siswa, meskipun latar belakang status sosial siswa berbeda. Contoh lain, seorang guru harus dapat bertindak ketika melihat sekelompok siswa membuat "geng" yang beranggotakan para siswa dengan latar belakang kelas sosial-ekonomi tertentu.

Melihat fenomena semacam itu, guru harus tanggap dan mampu menjelaskan, membimbing dan menyadarkan para siswa tersebut untuk tidak mengeksklusifkan diri, karena hal itu tidak sesuai dengan etika dan norma-norma kehidupan sosial kemasyarakatan. Selain itu, harus dijelaskan bahwa tindakan tersebut merupakan salah satu bentuk diskriminasi terhadap siswa lain.

Sekolah juga mempunyai peran penting dalam membangun kesadaran kritis siswa dalam melihat ketidakadilan sosial di sekeliling. Agar peran ini dapat dimanfaatkan secara baik.

SIMPULAN

Kemajuan teknologi akibat pesatnya arus globalisasi, merubah pola pengajaran dalam dunia pendidikan. Pengajaran yang bersifat klasikal berubah menjadi pengajaran yang berbasis teknologi baru seperti internet dan computer.

Perubahan Corak Pendidikan, mulai melonggarkan kekuatan kontrol pendidikan oleh negara. Tuntutan untuk

berkompetisi dan tekanan institusi global, seperti IMF dan World Bank, mau atau tidak, dunia politik dan pembuat kebijakan harus berkompromi untuk melakukan perubahan.

Penyebab buruknya pendidikan di era globalisasi di Indonesia adalah Mahalnya biaya pendidikan. Kualitas SDM yang rendah dan fasilitas pendidikan yang kurang, sehingga pendidikan tidak berjalan secara baik. Indonesia sekarang ini membutuhkan *visioning* (pandangan), *repositioning strategy* (strategi), dan *leadership* (kepemimpinan). Tanpa itu semua, Indonesia tidak akan pernah beranjak dari transformasi yang terus berputar-putar. Dengan visi yang jelas, tahapan-tahapan yang juga jelas, dan komitmen semua pihak serta kepemimpinan yang kuat semua dapat tercapai.

DAFTAR RUJUKAN

- Abdulla, Amin. 2004. "Fungsi Ganda Agama Dalam Negara: Perekat Bangsa dan Pengkritik Prilaku Penyelenggara Negara", Makalah disampaikan dalam Seminar Nasional. "tentang Potensi Nasional dan Ancaman Internasional".
- Arief, Sritua . 1998. Pembangunan dan Ekonomi Indonesia Pemberdayaan Rakyat dalam arus Globalisasi, CPSM. Jakarta.
- Anderson, L. Margaret, 1998. *Thinking About Women: Sociological Prespective on Sex and Gender*, MacMilan publishing Company, NY.
- Azizy, Qodri, 2002. Pendidikan (Agama) Untuk Membangun Etika Sosial: Mendidik Anak Sukses Masa Depan Pandai dan Bermanfaat, Aneka Ilmu: Semarang.

- Elwood Jr, S Robert. 1982. *Many People Many faiths*, Prentice Hall, (NJ., 1982. Hlm 103)..
- Marx, Karl and Engels, Fredrik. 1995. *Manifesto of the Communist Party*. Internasional Publisher, NY.
- Sapriya H. 2007. *Pemikiran Pakar Tentang Pendidikan Kewarganegaraan Dalam Pembangunan Karakter Bangsa*, Disertasi Doktor Pada Universitas Pendidikan Indonesia.
- Smith, Huston, 1991. *The Word's Religion*. (Harper Collin Publishers, NY. hlm 55).
- Ritzer, George et al., *Sociology, Experiencing a Chaging Society*, Allyn and Bacon, Boston, 1991.
- Yakin Ainul, Pendidikan Multikultural: *Cross-Cultural Understanding*, Untuk Demokrasi dan Keadilan: Pilar Media 2005.
- Lihat Kompas, 17/10/2003
- Lihat Kompas, 17/10/2003
- Lihat Kompas, 22/10/2003
- Lihat Gatra, 29/5/2004